

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN MILITER

Paras Setio¹ dan Marcus Priyo Gunarto²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan pidana yang berbeda terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkoba serta untuk mengevaluasi dan menentukan perbedaan putusan hakim Pengadilan Militer apakah telah memperoleh pembenaran menurut hukum terhadap anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna narkoba.

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Bahan penelitian hukum pada dasarnya terdiri dari data primer dan data sekunder. Cara dan alat memperoleh data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis menggunakan metode analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. pertama Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana yang berbeda terhadap Anggota TNI sebagai pelaku penyalah guna didasarkan atas pertimbangan yang bersifat khusus yang dilihat dari kasus-perkasus seperti pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan yang bersifat umum yang dilihat dari hukum itu sendiri. kedua disparitas pidana dapat dibenarkan menurut hukum apabila pertimbangan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum pidana materiil yang memuat pertimbangan khusus berkaitan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta pertimbangan secara umum yang berkaitan dengan hukum yang diterapkan itu sendiri, serta sesuai dengan hukum pidana formil apabila hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pengadilan Militer, dan Narkoba.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (paras.setio@mail.ugm.ac.id).

² Dosen Program S-2 Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (marcus.ugm@gmail.com)

DISPARITY OF CRIMINAL VERDICT TOWARD INDONESIA MILITARY RANKER AS NARCOTICS USER IN MILITARY COURT

Paras Setio^{*} and Marcus Priyo Gunarto^{**}

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze and describe the basis for consideration of Military court judges in deciding different condemnation decisions toward members of Indonesian National Army (TNI) as narcotic abusers. This study to evaluate and determine different decisions of Military court judges are related whether TNI members have obtained legal justification as narcotics abuser.

This type of this research is a normative legal research which has the object of the legislation and other legal materials. legal research material basically consists of primary data and secondary data. The methods and instruments of this data through library research with analytical methods by using qualitative analysis methods and deductive conclusions.

This study has two conclusions. First, consideration of Military court Judges in deciding different condemnation decision towards members of Indonesian National Army (TNI) as narcotic abusers based on special considerations that are seen from the cases such as consideration of incriminating matters and mitigating matters from the defendant's actions. General considerations are seen from the law itself. second, according to law that disparity of condemnation can the provisions of material criminal law in which contains special consideration relates to the nature and consequences of the defendant's actions. as well as general considerations relate to the applied law itself, and they have appropriate with formal penal law if judge decides case in accordance with the provisions of the procedural law that are contained in law Number 31 of 1997 on Military Court

Key words : Disparity of Sentencing, Military Court, and Narcotics.

^{*} Student of Master of Litigation in Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta (paras.setio@gmail.ugm.ac.id).

^{**}Lecture of Master of Litigation Program in Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta (marcus.ugm@gmail.com).